

BALI DIPROYEKSIKAN MENGALAMI BONUS DEMOGRAFI PUNCAK 2020-2030 : PELUANG ATAU BENCANA?¹

NYOMAN DAYUH RIMBAWAN
Koalisi Kependudukan Provinsi Bali
dayuhrimbawan@yahoo.com

ABSTRAK

Bali merupakan salah satu dari 33 provinsi yang ada di Indonesia. Luasnya relatif sempit yaitu 5.636,66 km² (0,29 persen dari luas wilayah Indonesia). Dengan jumlah penduduk hampir mencapai 3,9 juta jiwa (SP 2010), ini berarti tingkat kepadatan penduduknya mencapai 690 jiwa/km² (menempati urutan besar ketujuh setelah propinsi-propinsi yang ada di Pulau Jawa). Bali mengalami bonus demografi puncak lebih awal dan durasinya lebih panjang dibandingkan dengan nasional. Oleh karenanya ekonomi Bali berpotensi berkembang lebih awal dan lebih lama dibandingkan dengan level nasional. Bali diproyeksikan mengalami bonus demografi puncak periode 2020-2030. Periode ini *dependency ratio* Bali adalah terendah yaitu antara 42,2-43,3 persen. Bonus demografi tidak otomatis menguntungkan. Menurut Aswatini (2012) manfaatnya bisa dipetik jika ada kesiapan kebijakan pemerintah seperti memperkuat investasi di bidang kesehatan, pendidikan maupun ketenagakerjaan. Tetapi menjadi bencana jika penduduk usia produktif dalam kondisi pendidikan rendah, keahlian rendah, serta kondisi kesehatan buruk, yang membuat tidak dapat berproduksi secara optimal. Tetapi, persyaratan untuk memanfaatkan bonus demografi sebagai *engine of economic growth* nampaknya belum bisa dilakukan secara optimal. Hal ini disebabkan kualitas SDM-nya relatif masih rendah. *Human investment* bersifat jangka panjang sedangkan bonus demografi sudah didepan mata. Disisi lain investasi yang dilakukan pemerintah melalui APBD-nya relatif rendah karena sebagian besar dana dialokasikan untuk biaya rutin sebagai konsekwensi dari birokrasi yang gemuk. Sebaliknya peluang investasi swasta tidak banyak karena Bali miskin sumber daya alam. Terbatasnya peluang investasi mengakibatkan penduduk usia produktif yang melimpah karena terjadinya bonus demografi puncak tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

Kata kunci: bonus demografi; investasi sumber daya manusia; pertumbuhan ekonomi

ABSTRACT

Bali is one of the 33 provinces in Indonesia. It is a relatively narrow is 5636.66 km² (0.29 percent of the total area of Indonesia). With a population of nearly 3.9 million people (SP 2010), this means the population density reaches 690 inhabitants / km² (large ranks seventh after the provinces in Java). Bali experienced a demographic dividend peak earlier and longer duration than the national. Therefore, the Balinese economy potentially developed earlier and longer than the national level. Bali is projected to experience a demographic bonus peak period 2020-2030. This period Bali dependency ratio is lowest at 42.2 to 43.3 percent between. Favorable demographic bonus is not automatic. According Aswatini (2012), benefits can be learned if there is readiness of government policies such as strengthening investment in health, education and employment. But to be a disaster if the productive population in conditions of low education, low skills, and poor health conditions, which makes it able to produce optimally. However, the requirement to take advantage of the demographic bonus as the engine of economic growth unlikely to be performed optimally. This is due to the quality of its human resources is still relatively low. Human investment as long term while the demographic bonus has been in front of the eye. On the other hand the investment made by the government through its budget is relatively low because most of the funds allocated for routine costs as a consequence of bureaucratic fat. Instead of private investment opportunities are not many because Bali poor in natural resources. Limited investment opportunities resulting in productive age population is abundant because of the demographic bonus peaks can not be used optimally.

Keywords: demographic bonus; investment in human resources; economic growth

¹ Artikel ini merupakan pengembangan dari artikel penulis dalam bentuk *policy brief* yang berjudul **Bonus Demografi Menciptakan Jendela Peluang Pertumbuhan Ekonomi; Mampukah Bali memanfaatkan peluang emas ini?**. *Policy brief* tersebut dipublikasi oleh BKKBN Propinsi Bali tahun anggaran 2014.

PENDAHULUAN

Setahun terakhir ini perbincangan mengenai bonus demografi sangat intens dilakukan oleh para akademisi dan birokrat level nasional yang mengurus masalah kependudukan. Seperti kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) hampir dalam setiap pertemuan dengan berbagai elemen masyarakat mengingatkan pentingnya kita menyiapkan diri menyongsong hadirnya bonus demografi yang sudah didepan mata. Tetapi pada level daerah nampaknya belum semua aparat birokrasi memahami dengan baik apa itu bonus demografi dan keterkaitannya dengan pembangunan.

Secara umum dapat didefinisikan bonus demografi adalah suatu kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan usia non-produktif. Perbandingan penduduk usia produktif dengan non-produktif disebut rasio beban tanggungan (*dependency ratio*). Jika rasionya kurang dari 50,00 persen, berarti jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan non-produktif. Menurut hasil Sensus Penduduk (SP) 2010 *dependency ratio* Bali kurang dari 50,0 persen yaitu 48,1 persen. Ini berarti setiap 100 penduduk usia produktif di Bali menanggung 48 penduduk usia non-produktif.

Bonus demografi seperti pedang bermata dua. Disatu sisi menguntungkan (sebagai peluang) bila penduduk usia produktif tersebut mempunyai pendidikan dan ketrampilan yang memadai serta bekerja atau mempunyai usaha produktif. Sebaliknya jika penduduk usia produktif tersebut mempunyai pendidikan yang rendah dan tidak produktif, mereka tidak pantas disebut sebagai bonus tetapi lebih tepat sebagai beban (menjadi bencana). Haryono Suyono (2013) mengatakan bonus demografi dapat menyesatkan karena setiap pemangku kebijakan bisa saja menunggu sampai "bonus" itu datang tanpa melakukan sesuatu yang berarti dalam upaya bagaimana bonus tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Dewasa ini kondisi penduduk pada kelompok muda cukup memprihatinkan terutama dari segi pendidikan. Menurut hasil SP 2010 tercatat penduduk Indonesia umur diatas 6 tahun yang tidak/belum sekolah mencapai 14,2 juta jiwa. Dari jumlah tersebut sekitar 11,00 persen berumur muda (7-24 tahun).

Bonus demografi mencerminkan potensi tenaga kerja yang tersedia. Tenaga kerja sebagai salah satu komponen faktor produksi selain modal (mesin, gedung tanah, bahan baku dan peralatan lain) mempunyai peran penting dalam proses produksi. Terdapat hubungan fungsional antara jumlah barang dan jasa yang diproduksi dengan tenaga kerja. Artinya setiap perubahan jumlah barang/jasa yang diproduksi, tenaga kerja yang diperlukan juga berubah. Perubahan jumlah barang/jasa yang diproduksi dari waktu ke waktu mencerminkan pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu perubahan-perubahan banyaknya tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan memproduksi barang/jasa berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi.

Di setiap negara atau daerah tidak semua tenaga kerja yang tersedia bisa diserap dalam memproduksi barang/jasa. Jika yang tidak terserap banyak, maka bonus demografi tidak bisa disebut sebagai bonus, tetapi berpotensi menjadi bencana. Karena tenaga kerja yang tidak terserap tersebut akan berstatus sebagai pengangguran. Pengangguran berpotensi memunculkan kemiskinan. Dampak negatif dari kemiskinan antara lain kekumuhan, kriminalitas, pencemaran lingkungan, dan gangguan kesehatan.

Indonesia terdiri atas 33 propinsi. Kondisi sosial ekonomi antara provinsi yang satu dengan yang lain bervariasi. Hal ini mengakibatkan bonus demografi yang dialami oleh provinsi-propinsi yang ada di Indonesia belum tentu sama baik dari segi mulai ataupun durasinya.

Deskripsi berikut hanya menguraikan bonus demografi di Propinsi Bali apakah lebih banyak berpotensi sebagai bonus atau sebaliknya. Kita tidak boleh berdiam diri menunggu datangnya bonus demografi tersebut. Banyak hal yang harus dipersiapkan sehingga saat bonus demografi tersebut tiba dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga betul-betul menjadi berkah bukan bencana.

KAJIAN PUSTAKA

Sebelumnya sudah disebutkan bahwa suatu negara/daerah mengalami bonus demografi jika jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan non-produktif. Penduduk usia produktif adalah penduduk yang berumur antara 15-64 tahun. Sedangkan usia non-produktif adalah penduduk yang berumur 0-14 tahun dan 65 tahun keatas. Perbandingan antara kedua kelompok penduduk tersebut disebut rasio beban tanggungan. Oleh karena itu rasio beban tanggungan merupakan hasil bagi antara jumlah penduduk usia 0-14 tahun + penduduk usia 65 tahun keatas dengan penduduk usia 15-64 tahun dikalikan 100. Suatu negara atau daerah dikatakan mengalami bonus demografi jika rasio beban tanggungannya dibawah 50,0 persen. Bonus demografi puncak terjadi jika rasio beban tanggungan berada pada titik terendah. Pada posisi ini suatu negara/daerah dikatakan menuju terbukanya jendela peluang (*window of opportunity*); artinya bonus demografi puncak tersebut berpotensi sebagai *engine of economic growth*. Mengapa? Karena pada saat bonus demografi puncak, jumlah penduduk usia produktif jauh lebih banyak dibandingkan usia non produktif. Akibatnya tersedia tenaga kerja yang relatif banyak, dan sekaligus beban ketergantungan atau dukungan ekonomi yang harus diberikan oleh penduduk usia produktif kepada penduduk usia non-produktif menjadi lebih ringan. Akibatnya penduduk usia produktif

mempunyai peluang memperbesar tabungan. Seperti diketahui tabungan menjadi salah satu sumber pembiayaan investasi. Investasi merupakan salah satu komponen penting dari peningkatan laju pertumbuhan ekonomi suatu negara/daerah.

Menurut Armida (2014) Indonesia telah memasuki bonus demografi sejak tahun 2012, dan bergerak menuju terbukanya jendela peluang (*window of opportunity*) pada periode 2028-2031. Dalam periode ini rasio ketergantungan berada pada level yang terendah yaitu 46,9 persen, artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 47 penduduk usia non produktif. Tahun 2035 rasio ini diproyeksikan akan naik kembali menjadi 47,3 persen karena makin banyaknya penduduk lanjut usia (lansia). Menurut Sri Moertiningsih Adioetomo (2013) *the window of opportunity* hanya terjadi sekali dalam sejarah bangsa Indonesia.

Di Indonesia bonus demografi terjadi karena proses transisi demografi yang berkembang sejak beberapa tahun lalu dipercepat oleh menurunnya angka kelahiran (*TFR: Total Fertility Rate*) karena berhasilnya Program KB, meningkatnya kualitas kesehatan dan suksesnya program-program pembangunan sejak era Orde Baru hingga sekarang. Akibatnya struktur umur penduduk berubah yang mulanya didominasi oleh penduduk usia muda (anak-anak dan remaja) kemudian bergeser pada kelompok umur produktif. Kondisi seperti ini menguntungkan, karena beban ketergantungan atau dukungan ekonomi yang harus diberikan oleh penduduk usia produktif kepada penduduk usia non-produktif menjadi lebih ringan.

Menurut Yuswohady (2012) bonus demografi menjadi pilar peningkatan produktivitas suatu negara dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan SDM produktif. Ketika angka fertilitas menurun, pertumbuhan pendapatan perkapita untuk memenuhi kebutuhan penduduk usia anak-anak dapat dialihkan untuk peningkatan mutu manusia. Pada saat yang sama, jumlah anak yang sedikit membuka peluang perempuan untuk masuk ke pasar kerja yang sekali lagi akan mendongkrak produktivitas. Indonesia yang sudah mengalami bonus demografi tahun 2012 dan 2013 – kendati belum puncak – tetapi belum mampu meningkatkan produktivitas secara signifikan. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonominya yang stagnan pada level dibawah 7,0 persen. Jika bonus demografi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal tidak tertutup kemungkinan pertumbuhan ekonomi diatas 7,0 persen akan dapat dicapai (Kompas, 11/8/2014).

Pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah disebabkan sejumlah prasyarat belum terpenuhi. Prasyarat itu meliputi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan keterampilan, pengendalian laju pertumbuhan penduduk, dan dukungan kebijakan ekonomi. Agus Heruanto

Hadna (2014) menyatakan, capaian pemenuhan prasyarat itu sampai dengan hari ini masih rendah. Ini akibat kependudukan menjadi isu marjinal sejak reformasi. Padahal, untuk menggenapi prasyarat itu, perlu konsistensi program jitu selama bertahun-tahun (jangka panjang). Itu artinya bonus demografi menjadi kesempatan jika penduduk usia produktif tidak hanya potensial tapi aktual. Ketersediaan lapangan kerja seimbang dengan pertumbuhan pencari kerja. Mereka yang memiliki ketrampilan, pengetahuan, kesehatan serta etos kerja akan mampu mengelola produktivitas sehingga terbentuk tabungan yang dapat dimanfaatkan untuk investasi berikutnya. Pendapat diatas diperkuat oleh Disnakertransduk Jatim (2014) yang mengatakan bahwa bonus demografi tidak serta merta menumbuhkan perekonomian, tetapi harus disertai dengan kebijakan yang tepat, terutama peningkatan sumber daya manusia yang akan masuk angkatan kerja lewat kesehatan dan pendidikan. Pendidikan diperlukan untuk menyiapkan tenaga kerja terampil dan kompeten. Jika tidak demikian penduduk usia produktif akan menjadi boomerang ketika mereka tidak dibekali kemampuan untuk bisa bertahan hidup dan mengembangkan diri yang pada akhirnya hanya akan menjadi beban pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja dan terciptanya angka pengangguran yang tinggi.

Kontribusi penduduk usia produktif ini telah terlihat di beberapa negara seperti Brazil, Rusia dan India. Bahkan di sejumlah negara lain, bonus demografi telah berkontribusi menumbuhkan ekonomi mereka. Negara-negara seperti Thailand, Tiongkok, Taiwan dan Korea, bonus demografi di sana berkontribusi terhadap pertumbuhan sehingga ekonominya tumbuh antara 10-15 persen (Armida, 2014). Menurut Mason (2005) negara-negara industri Eropa, Asia Timur dan Asia Tenggara bonus demografi telah memberikan kontribusi yang positif. Sementara di negara-negara Amerika Latin, Afrika, negara-negara transisi dan Kepulauan Pasifik, bonus demografi cenderung mendominasi dibandingkan pertumbuhan ekonominya, yang dapat menjadi indikasi bahwa potensi bonus demografi pada periode tersebut tidak secara optimal dimanfaatkan (dalam Maliki, 2010).

Sri Murtiningsih Setyo Adioetomo (2014) mengungkapkan, apabila pemerintah dapat mengelola bonus demografi yang dimiliki Indonesia saat ini, maka pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 15 persen dapat dicapai. Di ASEAN sendiri, porsi 30 persen dari pertumbuhan ekonominya disumbang dari bonus demografi (<http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2014/07/14/265475/bonus-demografi-bisa-tingkatkan-pertumbuhan-hingga-15-persen>).

Deskripsi diatas menggambarkan bahwa bonus demografi seperti pedang bermata dua. Disatu sisi menguntungkan bila penduduk usia produktif tersebut mempunyai pendidikan dan ketrampilan yang memadai

serta bekerja atau mempunyai usaha produktif. Sebaliknya jika penduduk usia produktif tersebut mempunyai pendidikan yang rendah dan tidak produktif, mereka tidak pantas disebut sebagai bonus tetapi lebih tepat sebagai beban sehingga akan menjadi bencana.

METODE PENELITIAN

Kajian ini sepenuhnya menggunakan data skunder yang dikumpulkan dari berbagai publikasi seperti BPS, lembaga pendidikan tinggi, dan *browsing* lewat internet. Analisis data bersifat deskriptif dimana hubungan-hubungan antar variabel dilakukan dengan pendekatan deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

(1) Jumlah dan pertumbuhan penduduk.

Bali merupakan salah satu dari 33 provinsi yang ada di Indonesia. Luasnya relatif sempit yaitu 5.636,66 km² (0,29 persen dari luas wilayah Indonesia). Dengan jumlah penduduk hampir mencapai 3,9 juta jiwa (SP 2010), ini berarti tingkat kepadatan penduduknya mencapai 690 jiwa/km² (menempati urutan besar ketujuh setelah propinsi-propinsi yang ada di Pulau Jawa).

Selama 50 tahun terakhir (1961-2010) laju pertumbuhan penduduk Bali mengikuti dua pola (Gambar 1). Pertama, periode 1961-1990 dimana laju pertumbuhannya menunjukkan trend yang menurun dari 1,75 persen (1961-1970) menjadi 1,18 persen (1980-1990). Penurunan ini terjadi karena dua dari tiga komponen pertumbuhan penduduk bersifat menekan laju pertumbuhan penduduk. Komponen pertama adalah angka kelahiran (*TFR*) yang menurun lebih dari 60,0 persen yaitu dari 6,0 (1967-1970) menjadi 2,3 periode 1987-1990 (Sudibia, 1992). Penurunan *TFR* ini tidak dapat dilepaskan dari suksesnya Program KB yang dilaksanakan secara intensif mulai tahun 1970 oleh pemerintah Orde Baru.

Komponen kedua yaitu migrasi juga bersifat menekan laju pertumbuhan penduduk Bali. Hal ini terlihat dari angka migrasi risen netto Bali sebelum tahun 1990 selalu bersifat negatif, artinya jumlah penduduk Bali yang keluar dari Bali lebih banyak dibandingkan dengan penduduk luar Bali yang masuk ke Bali. Menurut SP 1980 migrasi risen netto Bali minus hampir mencapai 46.000 jiwa. Kemudian menurut SUPAS 1985 minusnya berkurang menjadi sekitar 3.000 jiwa. Relatif banyaknya penduduk Bali yang pindah keluar Bali sebelum tahun 1990 salah satunya karena ikut Program Transmigrasi dengan daerah tujuan seperti Pulau Sumatera, Sulawesi atau pulau-pulau lainnya.

Komponen ketiga yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah angka kematian. Angka kematian bersifat menekan laju pertumbuhan penduduk. Tetapi

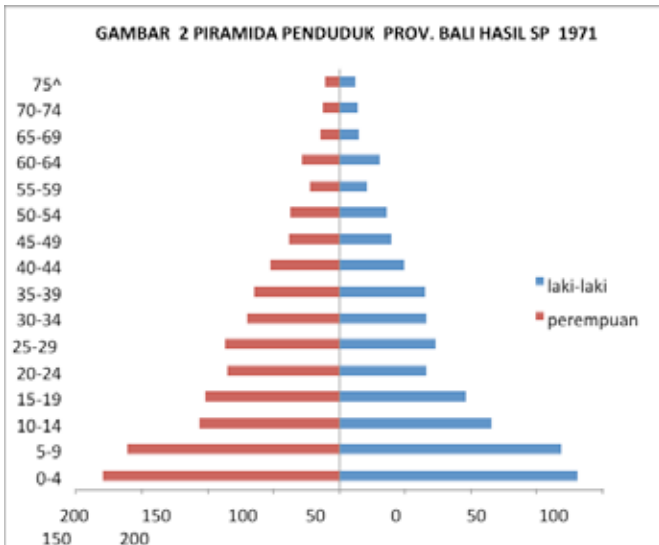
perannya semakin melemah karena angka kematian semakin menurun seiring dengan makin meluasnya pelayanan fasilitas kesehatan yang mampu disediakan oleh pemerintah ataupun swasta. Salah satu indikator dari menurunnya angka kematian terlihat dari meningkatnya angka harapan hidup. Tahun 1971 angka harapan hidup penduduk Bali hanya 48,27 tahun meningkat menjadi 64,33 tahun tahun 1990.

Gambar 1 Laju pertumbuhan penduduk (lpp) Bali dan Indonesia, 1961-2010

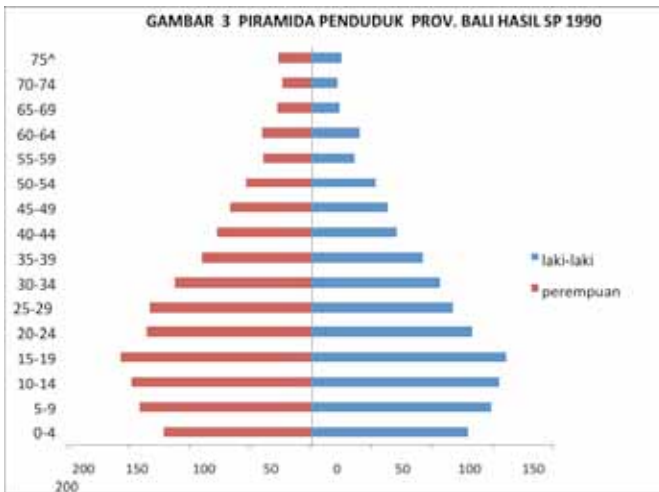


Kedua, periode 1990-2010 dimana laju pertumbuhan penduduk Bali menunjukkan trend yang semakin meningkat, malahan 2000-2010 angkanya melampaui pertumbuhan nasional. Padahal periode-periode sebelumnya laju pertumbuhan penduduk Bali selalu lebih rendah dibandingkan angka nasional. Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk tersebut seiring dengan meningkatnya *TFR* dari 1,9 (SP 2000) menjadi 2,1 (SP 2010), dan migrasi risen netto positif meningkat dari hampir 10.000 jiwa (SP 1990) menjadi lebih dari 61.000 jiwa (SP 2010). Disisi lain angka kematian semakin menurun yang ditunjukkan oleh meningkatnya angka harapan hidup dari 64,33 tahun (SP 1990) menjadi 72,67 tahun (SP 2010).

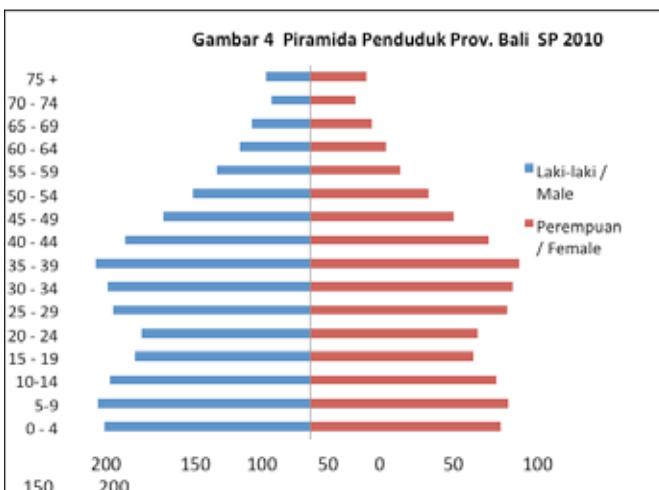
Perubahan-perubahan dalam *TFR*, migrasi, dan angka kematian tersebut salah satunya berpengaruh terhadap struktur umur penduduk seperti yang terlihat pada gambar Piramida 2, 3, dan 4. Pada Gambar 2 bagian piramida menonjol dibagian bawah. Ini berarti jumlah penduduk umur muda (usia 0-14 tahun) adalah paling banyak. Hal ini mencerminkan angka *TFR* yang relatif tinggi. Gambar 3 bentuk piramida berubah, dimana yang menonjol ada dibagian tengah. Sebaliknya dibagian bawah menjadi lebih pendek. Hal ini mencerminkan makin banyaknya penduduk usia produktif dan menurunnya angka *TFR*. Gambar 4 menunjukkan penonjolan bukan saja terjadi pada bagian tengah piramida, tetapi juga pada bagian bawahnya. Ini menggambarkan penduduk usia produktif dan anak-anak adalah dominan. Perubahan-perubahan struktur umur tersebut berpengaruh terhadap tinggi rendahnya *dependency ratio*.



hampir 88 penduduk usia non-produktif. Tahun 1990 beban tanggungan penduduk usia produktif menurun dimana setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 56 penduduk usia non-produktif (Gambar 5). Tahun 2000 *dependency ratio* turun lagi menjadi 45,6 persen dan tahun 2010 naik tetapi masih dibawah 50,0 persen.



Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa periode 2000-2010 Bali sudah mengalami bonus demografi kendatipun belum mencapai puncak. Artinya dalam kurun waktu tersebut Bali belum memasuki *window of opportunity* yaitu suatu kondisi dimana *dependency ratio* berada pada level terendah. Bonus demografi puncak ditandai oleh *dependency ratio* berada pada rentang 40-50%, yang berarti 100 orang usia produktif menanggung 40-50 orang usia tidak produktif (<http://www.yuswohady.com/2012/11/17/bonus-demografi/>).



Pertanyaan yang muncul sekarang apakah bonus demografi yang dialami Bali sejak tahun 2000 sudah dapat berfungsi sebagai *engine of economic growth*? Pada Gambar 6 terlihat bahwa periode 2001-2010 pola perkembangan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi Bali hampir serupa, artinya kenaikan/penurunan kesempatan kerja diikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi/rendah kecuali tahun 2002 dan 2009 menunjukkan keadaan yang berlawanan. Lonjakan pertumbuhan ekonomi terjadi pada periode lima tahun pertama (2001-2005) yaitu dari 3,39 persen menjadi 5,56 persen. Sedangkan pada periode lima tahun kedua (2006-2010) ekonomi tumbuh relatif stabil pada kisaran 5,28-5,97 persen. Hal ini menjadi indikasi bahwa bonus demografi dalam memicu pertumbuhan ekonomi lebih kuat pada periode lima tahun pertama dibandingkan dengan lima tahun kedua. Kendatipun demikian nampaknya bonus demografi belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai dalam kurun waktu 2001-2010 relatif rendah yaitu kurang dari 6,0 persen.

(2) Perkembangan emperis *Dependency ratio*.

Selama kurun waktu 1971-1990 *dependency ratio* Bali makin mengecil tetapi masih diatas 50,0 persen. Berdasarkan hasil SP 1971 angkanya 87,6 persen. Ini berarti setiap 100 penduduk usia produktif menanggung

Gambar 6 juga menunjukkan bahwa terjadi korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Periode lima tahun pertama pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah diikuti oleh tingkat pengangguran yang semakin tinggi. Sebaliknya pada periode lima tahun



kedua ekonomi tumbuh lebih tinggi dan diikuti oleh tingkat pengangguran yang semakin menurun. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi pertumbuhan ekonomi kemampuannya menciptakan kesempatan kerja semakin banyak. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa setiap negara/daerah dalam proses pembangunan menjadikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi salah satu sasaran penting.

(3) Kapan Bali memasuki bonus demografi puncak?

Bonus demografi puncak tercapai jika *dependency ratio* adalah terendah. Posisi ini dikatakan paling menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi karena dua hal berikut. Pertama, jumlah penduduk usia produktif relatif banyak yang berimplikasi pada tersedianya faktor produksi tenaga kerja (SDM) yang banyak pula. Kedua, beban tanggungan penduduk usia produktif secara ekonomi relatif rendah sehingga peluang mereka untuk menabung tinggi. Tabungan merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk berbagai kegiatan produktif baik yang dilakukan pemerintah ataupun swasta.

Bali diproyeksikan mengalami bonus demografi puncak periode 2020-2030. Periode ini *dependency ratio* Bali adalah terendah yaitu antara 42,2-43,3 persen (Gambar 7). Bonus demografi tidak otomatis menguntungkan. Menurut Aswatini (2012) manfaatnya bisa dipetik jika ada kesiapan kebijakan pemerintah seperti memperkuat investasi di bidang kesehatan, pendidikan maupun ketenagakerjaan. Tetapi menjadi bencana jika penduduk usia produktif dalam kondisi pendidikan rendah, keahlian rendah, serta kondisi kesehatan buruk, yang membuat tidak dapat memproduksi secara optimal.

Kelompok penduduk yang mana berperan dalam aktivitas perekonomian saat Bali memasuki bonus demografi puncak? Jika mengacu pada penduduk usia produktif yaitu 15-64 tahun, maka yang berperan nanti saat Bali memasuki bonus demografi puncak adalah penduduk yang saat ini berada pada rentang umur 5-54 tahun.

Berdasarkan hasil SP 2010 jumlah penduduk Bali hampir mencapai 3,9 juta jiwa. Dari jumlah tersebut

77,6 persen (lebih dari 3 juta jiwa) berumur 5-54 tahun. Kelompok penduduk ini akan berumur 15-65 tahun pada tahun 2020 yaitu saat Bali memasuki bonus demografi puncak. Tetapi kelompok penduduk ini berpendidikan relatif rendah, dimana hampir 50,0 persen hanya tamat SD kebawah. Sedangkan untuk kelompok pendidikan yang lebih tinggi yaitu SLTP sampai Perguruan Tinggi proporsinya pada masing-masing jenjang pendidikan kurang dari 5,0 persen kecuali tingkat SLTP dan SLTA mencapai 15,8 persen dan 26,8 persen. Pada saat memasuki bonus demografi puncak diperkirakan tingkat pendidikan kelompok ini akan meningkat karena ada kemungkinan mereka yang saat ini berumur 5-18 tahun, beberapa diantaranya akan melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Saat ini penduduk umur 5-18 tahun hampir mencapai 30,0 persen (sekitar 900.000 jiwa) dari seluruh penduduk umur 5-54 tahun.

Relatif rendahnya kualitas SDM saat ini dapat juga dilihat dari pendidikan angkatan kerja yang berstatus belerja. Pada Gambar 6 diatas terlihat tahun 2010 angkatan kerja yang berstatus bekerja sebanyak 2,18 juta jiwa. Sekitar 45,0 persen dari pekerja tersebut hanya berpendidikan tamat SD kebawah. Sedangkan yang berpendidikan perguruan tinggi (D1 s/d S3) sekitar 10,0 persen, sisanya berpendidikan SLTP dan SLTA masing-masing 14,5 persen dan 29,6 persen. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa saat ini (2010) tingkat pendidikan penduduk usia 5-54 tahun dan angkatan kerja yang berstatus bekerja polanya hampir sama yaitu lebih banyak berpendidikan relatif rendah.

Masalah lain yang dihadapi dalam bidang pendidikan adalah kualitas lulusan. Tingkat pengangguran justru lebih banyak dijumpai dikalangan terdidik. Tahun 2010 tingkat pengangguran terbuka di Bali 3,06 persen (setara: 68.791 jiwa). Sekitar 52,0 persen dari penganggur tersebut berpendidikan tamat SLTA keatas. Sedangkan sisanya yaitu 48,0 persen berpendidikan tamat SLTP kebawah. Kualitas SDM yang rendah akan menghambat mereka masuk kekegiatan ekonomi yang bersifat modern. Padahal saat ini struktur perekonomian Bali dilihat dari kontribusi masing-masing sektor dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sudah berorientasi pada Sektor Jasa-jasa (Tertier). Tahun 2010 kontribusi sektor ini dalam pembentukan PDRB mencapai 63,9 persen, kemudian disusul Sektor Pertanian (Primer) dan Industri Pengolahan masing-masing 20,5 persen dan 15,6 persen (harga konstan 2000).

Kedepan Sektor Primer (Pertanian) kontribusinya dalam pembentukan PDRB akan menyusut seiring dengan makin sempitnya lahan pertanian karena alih fungsi menjadi non-pertanian (fasilitas sosial-ekonomi) seiring dengan makin bertambahnya penduduk. Akibatnya kebutuhan tenaga kerja di sektor ini semakin berkurang. Tambahan angkatan kerja akan mengarah ke Sektor Skunder dan Tertier. Kedua sektor ini secara umum

memerlukan kualifikasi pendidikan pekerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang berada di Sektor Primer. Oleh karenanya penyediaan fasilitas pendidikan yang cukup baik dilihat dari kualitas ataupun kuantitas menjadi sangat penting dalam menyongsong munculnya bonus demografi yang saat ini sudah di depan mata. Padahal pengembangan sumber daya manusia yang merupakan investasi jangka panjang menjadi senjata utama kemajuan suatu bangsa. Dalam hal ini pemerintah harus mampu menjadi *agent of development* dengan cara memperbaiki mutu modal manusia, mulai dari pendidikan, kesehatan, kemampuan komunikasi, serta penguasaan teknologi. Solusi lainnya bisa dengan memberikan keterampilan kepada tenaga kerja produktif sehingga pekerja tidak hanya bergantung pada ketersediaan lapangan pekerjaan tapi mampu menciptakan lapangan pekerjaan itu sendiri. Bukan hanya pemerintah, masyarakat juga harus menjadi pendukung utama pembangunan mutu manusia dengan cara menyadari pentingnya arti pendidikan, kesehatan dan aspek-aspek yang dapat mengembangkan kualitas manusia itu sendiri.

Peningkatan kualitas SDM saja tidak cukup. SDM tersebut harus dapat diserap dalam berbagai kegiatan ekonomi. Oleh karenanya hal yang tak kalah penting adalah bagaimana perekonomian bisa tumbuh dan berkembang sehingga SDM yang semakin meningkat baik kuantitas atau kualitasnya dapat teriserap semaksimal mungkin. Jika hal ini terjadi maka bonus demografi akan memacu pertumbuhan ekonomi.

Mengingat awal bonus demografi puncak sudah didepan mata (2020) diperkirakan tingkat pendidikan penduduk kecil kemungkinannya dapat meningkat secara signifikan. Kecuali ada terobosan yang mendasar dalam pengelolaan bidang pendidikan selama beberapa tahun kedepan. Tetapi melihat kondisi saat ini kendatipun hampir semua kabupaten/kota termasuk propinsi Bali APBD-nya sudah mengalokasikan biaya pendidikan sebesar 20,0 persen tetapi didalamnya masih termasuk komponen gaji guru. Sehingga yang betul-betul dapat dimanfaatkan untuk peningkatan proses belajar mengajar kurang dari 20,0 persen. Disisi lain alokasi anggaran dalam APBD untuk biaya modal (investasi) relatif rendah. Sebagian besar dana masih dialokasikan untuk belanja rutin. Hal ini dialami oleh hampir semua kabupaten/kota termasuk juga propinsi. Belanja modal yang rendah kurang mendorong terciptanya kesempatan kerja. Kinerja birokrasi dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif juga belum optimal. Oleh karena itu bonus demografi puncak yang diproyeksikan dialami Bali periode 2020-2030 belum tentu dapat dimanfaatkan maksimal.

SIMPULAN DAN SARAN

(1) Simpulan

Bali mengalami bonus demografi puncak lebih awal dan durasinya lebih panjang dibandingkan dengan nasional. Oleh karenanya ekonomi Bali berpotensi berkembang lebih awal dan lebih lama dibandingkan dengan level nasional. Tetapi persyaratan untuk memanfaatkan bonus demografi sebagai *engine of economic growth* nampaknya belum bisa dilakukan secara optimal. Hal ini disebabkan kualitas SDM-nya relatif masih rendah. *Human investment* bersifat jangka panjang sedangkan bonus demografi sudah didepan mata. Disisi lain investasi yang dilakukan pemerintah melalui APBD-nya relatif rendah karena sebagian besar dana dialokasikan untuk biaya rutin sebagai konsekuensi dari birokrasi yang gemuk. Sebaliknya peluang investasi swasta tidak banyak karena Bali miskin sumber daya alam. Terbatasnya peluang investasi mengakibatkan penduduk usia produktif yang melimpah karena terjadinya bonus demografi puncak tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Ini berarti bonus demografi belum dapat berfungsi optimal sebagai *engine of economic growth*.

(2) Saran

- a. Penuntasan program wajib belajar 9 tahun dan kemudian mengarah ke program wajib belajar 12 tahun.
- b. Perbaiki kualitas pendidikan dalam rangka peningkatan *hard skill* ataupun *soft skill*.
- c. Membuka akses seluas-luasnya bagi kaum muda untuk mengikuti berbagai diklat keterampilan yang responsif terhadap pasar kerja.
- d. Pengembangan ekonomi kreatif terutama yang berkaitan dengan pariwisata.
- e. Program KB lebih diintensifkan dalam upaya menekan angka kelahiran dan peningkatan kualitas hidup.
- f. Peningkatan pengelolaan terhadap para migran yang masuk ke Bali.
- g. Meningkatkan *equaty* terhadap kesehatan dan pendidikan.
- h. Perbaiki iklim investasi kearah yang lebih kondusif
- i. Secara rutin dilakukan identifikasi terhadap bidang-bidang kegiatan ekonomi yang masih potensial untuk dikembangkan.
- j. Menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan usaha kecil, mikro dan menengah.
- k. Dalam merancang APBD belanja modal dari tahun ketahun porsinya harus semakin meningkat.
- l. Kebijakan ekonomi yang mendukung fleksibilitas tenaga kerja.
- m. Diperlukan kebijakan revitalisasi pendidikan dunia kerja, guna memenuhi tantangan ketenagakerjaan

dalam menghadapi keterbukaan pasar kerja ASEAN 2015, dimana tenaga kerja asal Negara ASEAN bebas bekerja di Indonesia termasuk di Bali.

DAFTAR PUSTAKA

- Said Rusli. 1983. **Pengantar Ilmu Kependudukan**. LP3ES, Jakarta.
- I Ketut Sudibia. 1992. **Penduduk Indonesia Selama Pembangunan Jangka Panjang Tahap I, BALI**. Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Jakarta.
- 1992. **Penduduk Bali, Hasil Sensus Penduduk 1990**, Seri S2.14. Biro Pusat Statistik, Jakarta.
- 1983. **Penduduk Propinsi Bali, Hasil Sensus Penduduk 1980**, Seri S Nomor 10. Biro Pusat Statistik, Jakarta.
- 2010. **Hasil Sensus Penduduk 2010, Data Agregat per kabupaten/kota Propinsi Bali**. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Denpasar.
- 2014. **Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035**. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52f4d97aa7ea3/bonus-demografi-berpotensi-tumbuhkan-ekonomi>.
- <http://www.yuswohady.com/2012/11/17/bonus-demografi/>
- <http://www.menkokesra.go.id/content/2017-2019-puncak-bonus-demografi>
- <http://hasrulharahap.wordpress.com/2013/11/07/bonus-demografi-peluang-dan-tantangan/>
- <http://dutaonline.com/2014/03/jangan-terkecoh-bonus-demografi/>
- <http://gayahidup.inilah.com/read/detail/1915558/bonus-demografi-peluang-atau-bencana>
- 2014. **Manfaatkan Bonus Demografi : Pilar Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi (http://disnakertransduk.jatimprov.go.id/ketenagakerjaan/903-)**.
- 2014. **BONUSDEMOGRAFITIDAKOPTIMAL: TIDAK PRODUKTIF DORONGEKONOMI**. (<http://www.cpps.or.id/content/bonus-demografi-tidak-optimal-tidak-produktif-dorong-ekonomi>)
- Maliki. 2014. **Pemanfaatan Bonus Demografi Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pembangunan**. <http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=129729&lokasi=lokal>
- Sri Moertiningsih Adioetomo. 2013. **Memfaatkan Jendela Peluang Memetik Bonus Demografi** . Disampaikan dalam seminar IPADI-BKKBN, 17 Oktober 2014, Jakarta.